

**Kekerasan dan Kriminalitas di Kota pada Saat Transisi:
Kotagede, Yogyakarta pada Akhir Masa Kolonial
dan Awal Kemerdekaan¹**

**Oleh:
Bambang Purwanto**

1. Antara Kenyataan dan Mitos

Ketika orang berbicara tentang kota Yogyakarta saat ini, maka salah satu imej yang muncul adalah sebuah kota yang tenang, damai, dan tenteram. Kota Yogyakarta dianggap jauh dari pergolakan, kekerasan, diskriminasi dan tidak membuat orang takut biarpun harus berjalan sendiri di larut malam. Tidak mengherankan jika ada yang berpendapat bahwa hal itu bukan lagi sekedar pandangan orang luar terhadap kota Yogyakarta, melainkan ketenangan, kedamaian, ketenteraman, keamanan, keharmonisan, dan solidaritas telah menjadi identitas kota yang dibentuk oleh sistem nilai dan realitas sosio-kultural masyarakatnya. Pandangan itu seolah-olah mendapat dukungan yang kuat dengan adanya kenyataan bahwa kota Yogyakarta terhindar dari kerusuhan sosial, ketika kota Surakarta yang memiliki banyak kesamaan bergolak pada saat kerusuhan anti Cina tahun 1980-an dan kerusuhan Mei 1998. Jika terjadi kekerasan di kota Yogyakarta, maka hal itu selalu dipandang sebagai akibat dari faktor eksternal, dan menolak adanya kontribusi faktor internal dalam setiap peristiwa. Oknum atau kambing hitam selalu menjadi pelarian yang paling laku untuk dijadikan alasan, tentu saja dengan cara mengingkari realitas. Akibatnya, tidak muncul kesadaran bahwa masyarakat kota Yogyakarta memiliki persoalan kultural dan sekaligus struktural yang mendorong terjadinya kekerasan.

¹ Makalah disampaikan pada seminar “Kota-kota di Indonesia dalam Perubahan” yang diselenggarakan oleh Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Airlangga, Surabaya 22-25 Agustus 2004. Penulis adalah staf pengajar Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya UGM. Komentar dan pertanyaan lebih lanjut tentang makalah ini dapat dialamatkan pada b.purwanto@mailcity.com dan purwanto349@yahoo.co.uk

The 1st International Conference on Urban History, Surabaya 23-25 August 2004

Pandangan di atas akan segera menjadi mitos, jika kita melihat realitas sejarah yang lain dari kota Yogyakarta. Terdapat bukti yang menunjukkan bahwa kekerasan dan ketidakteraturan, yang bahkan pada waktu tertentu dapat disebut sangat ekstrim, merupakan salah satu ciri penting dalam setiap masa kampanye pemilihan umum di kota Yogyakarta pada masa Orde Baru. *Klemang, golok*, sangkur dan berbagai jenis senjata mematikan lainnya selalu menjadi bekal utama para peserta kampanye, sesuatu yang tidak seharusnya terjadi jika masyarakatnya tidak menyimpan nilai-nilai kekerasan dan tidak ingin mewujudkan kekerasan. Ketakutan selalu mencekam para pemakai jalan atau penduduk kampung setiap masa kampanye, karena sewaktu-waktu perkelahian antar dua pesaing yang membahayakan mereka atau serangan sepihak bisa terjadi kapan saja, termasuk yang menimbulkan korban jiwa. Peristiwa kekerasan pada masa kampanye pemilihan umum tahun 1982 yang mengakibatkan Sri Sultan Hamengkubuwono IX turun tangan, merupakan salah satu contoh klasik dari kasus adanya kekerasan laten di kota Yogyakarta. Peristiwa serupa, baik dalam skala yang sama, lebih besar atau lebih kecil terus berulang.

Daftar tentang kekerasan sebagai sesuatu yang laten dalam sejarah masyarakat kota Yogyakarta akan semakin panjang jika dikaitkan dengan sentimen anti pendatang *sabrang* tahun 1970-an yang tidak hanya melibatkan tukang becak melainkan juga penduduk lokal, perkelahian rutin antar kampung yang mengakibatkan banyak korban pada tahun 1980-an, penembakan terhadap para *gali* yang dimulai di Yogyakarta pada tahun 1980-an, dan kekerasan antar *geng* para ABG tahun 1990-an. Pendapat itu semakin diperkuat oleh adanya realitas pada tingkat wacana yang menunjukkan banyaknya masyarakat kota Yogyakarta yang tidak mampu membedakan antara kekerasan dengan sesuatu yang bermanfaat. Salah satu contoh klasik dan sekaligus ironis, adalah berita di koran-koran lokal yang begitu apresiatif terhadap pawai kendaraan bermotor yang menggunakan *knalpot* yang memekakkan telinga pada saat kampanye pemilihan umum di masa Orde Baru. Ketika awal tradisi itu muncul di akhir tahun 1980-an, koran-koran lokal tidak pernah melihat hal itu sebagai gangguan dan bagian dari kekerasan terhadap masyarakat, namun sebaliknya memuji kampanye itu sebagai karya seni yang kreatif.

Sebagai seorang yang meragukan adanya realitas tunggal dan generalisasi sejarah ketika berbicara tentang masa lalu masyarakat, tulisan ini akan menghadirkan sisi lain dari realitas masa lalu Yogyakarta. Berbeda dengan tulisan lain yang cenderung menghadirkan realitas untuk melegitimasi kebesaran, makalah sederhana ini akan merekonstruksi sisi gelap dari masa lalu masyarakat Yogyakarta dalam rangka mengkonstruksi sejarah yang lebih manusiawi. Tulisan ini akan membahas kekerasan dan kriminalitas yang pernah terjadi di Kotagede, sebuah kota satelit hanya beberapa kilometer di sebelah tenggara pusat kota Yogyakarta, dan tidak bisa dipisahkan begitu saja dengan sejarah kota Yogyakarta pada masa akhir kekuasaan kolonial dan awal kemerdekaan. Tulisan ini diharapkan mampu mendekonstruksi kesadaran historis tentang kota Yogyakarta. Sebagai sebuah kenyataan, masa lalu kota Yogyakarta memproduksi berbagai fakta yang tidak seragam, sehingga akan sangat mudah bagi orang di masa kini terjebak untuk memproduksi identitas yang ahistoris jika tidak memperhatikan sejarah masyarakat Yogyakarta sebagai sebuah proses yang utuh.

2. Dari Kota *Abdi Dalem* ke Kota Saudagar

Sebagai sebuah unit geografis yang bersejarah, Kotagede pada awal abad ke-20 menurut H.J. van Mook tidak lagi menunjukkan dirinya sebagai sebuah ibukota dari salah satu bekas ibukota kerajaan Mataram Islam abad ke-17, kecuali nama yang melekat pada wilayah ini, masjid, makam, dan legenda yang terus hidup di dalam masyarakatnya. Kotagede telah melalui sebuah perjalanan sejarah yang panjang, sehingga tembok-tembok kota dan tata ruang kota yang tersisa pada awal abad ke-20 tidak lagi menunjukkan masa lalu sebuah kota yang pada awalnya berkembang sebagai kota keraton. Perpindahan pusat kerajaan Mataram dari Kotagede telah menjadikan salah satu kota yang dibangun dalam konsep lokal itu berubah identitas menjadi kota para *abdi dalem* yang bertugas menjaga makam dan masjid kerajaan. Status khusus itu tidak berubah setelah *palihan nagari* tahun 1775, ketika wilayah Kotagede dibagi dua mengikuti pembagian kerajaan Mataram menjadi Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Walaupun status ini tidak memiliki arti ekonomis yang berarti bagi penduduknya, H.J. van Mook paling tidak melihat bahwa status

kramat itu sebagai sesuatu yang mampu menyelamatkan Kotagede dari ekspansi kapitalis, ketika sebagian besar tanah *kejawan* menjadi *plandan* seiring dengan perluasan perkebunan perusahaan swasta Eropa sejak abad ke-19.

Pada masa Perang Diponegoro di dekade ke tiga abad ke-19, beberapa perubahan mulai terjadi di dalam masyarakat Kotagede. Selain para *abdi dalem* yang sangat dihormati karena fungsi kulturalnya, lapisan atas kota ini mulai diisi oleh para interprenur dari luar yang masuk ke Kotagede untuk meneruskan aktivitas ekonomi mereka sebelumnya. Secara perlahan mulai berkembang kelompok perajin dan pedagang di Kotagede, yang secara sosio-kultural seperti juga para *abdi dalem* memiliki ikatan yang kuat dengan keraton. Walaupun begitu, perkembangan kelompok pedagang dan perajin itu belum berdampak besar terhadap posisi sosial dan ekonomi para *abdi dalem*.

Perubahan besar baru terjadi setelah reorganisasi *Praja Kejawan* tahun 1910-an. Penghapusan tanah *apanage* yang mengiringi reorganisasi itu mengakibatkan para *abdi dalem* kehilangan sumber ekonomi sehingga mereka tidak mampu lagi bersaing dengan para keluarga kaya di Kotagede. Dalam waktu yang tidak lama, kemampuan ekonomi sebagian besar para *abdi dalem* itu jatuh ke dalam level kelompok para buruh harian dan petani. Walaupun para *abdi dalem* itu masih menikmati penghormatan karena posisi mereka sebagai penjaga tempat-tempat suci, dalam kenyataannya proses pergeseran loyalitas dari ikatan patronase ke hubungan ekonomi yang lebih rasional mulai terjadi di Kotagede. Para *abdi dalem* mulai lebih dianggap hanya sebagai simbol budaya dalam hubungan antara Kotagede dengan keraton daripada status sosial yang tinggi di dalam masyarakatnya sendiri. Adanya perubahan itu dapat dilihat pada komposisi demografis kota ini pada awal dekade ketiga abad ke-20. Menurut data yang berasal dari tahun 1922, dari 1073 pemilik rumah di Kotagede, 19,7% merupakan pedagang beserta perajin kaya dan 63,1% adalah perajin dan pedagang

eceran. Sementara itu *abdi dalem* bersama-sama pegawai pemerintah hanya berjumlah 8,5%, sedangkan sisa 8,7% terdiri dari para buruh dan petani.²

Para saudagar dan pemilik perusahaan kerajinan mulai mengambil alih kedudukan sosial dan ekonomi para *abdi dalem*, terutama ketika permintaan terhadap produk tekstil dan kerajinan, seperti permata dan barang-barang terbuat dari emas dan perak meningkat tajam pada awal abad ke-20. Beberapa bukti menunjukkan bahwa para saudagar kaya itu juga menjalankan bisnis gadai dan peminjaman uang, walaupun belum ditemukan bukti yang cukup untuk mendukung pernyataan tentang bisnis yang kedua. Bersama-sama pedagang kaya dari Kotagede, para saudagar dan perajin memberi sumbangan yang sangat besar bagi kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Mereka sangat dikenal baik oleh pedagang lokal maupun pedagang Cina di pasar besar Beringharjo di kota Yogyakarta dan pasar-pasar lain di Pulau Jawa. Banyak pedagang, beberapa dari mereka adalah perempuan dari Kotagede melakukan perjalanan bisnis secara rutin ke Surakarta, Magelang, Semarang, Surabaya dan bahkan Jakarta untuk menjual produk mereka dan kemudian membawa pulang berbagai barang impor. Walaupun begitu, sebagian besar orang kaya dari Kotagede itu tetap mempertahankan hubungan khusus mereka secara ekonomis dengan keraton, yang tetap menjadi salah satu konsumen reguler bagi berbagai jenis produk yang dihasilkan Kotagede. Seperti dikatakan oleh Selo Soemardjan dan Mitsuo Nakamura, pedagang dan pemilik perusahaan kerajinan di Kotagede memiliki kontak dagang yang rutin dengan para istri pejabat keraton Kasultanan Yogyakarta.

Keadaan itu mengakibatkan sektor non-pertanian di Kotagede berkembang sangat cepat pada awal abad ke-20. Kotagede berkembang menjadi pusat industri yang dikuasai oleh para interprenur bumiputera. Dalam bahasa yang lain seperti dikatakan oleh Mitsuo Nakamura, “Kotagede sedang berubah dari kota para perajin kerajaan menjadi pusat industri dan perdagangan bumiputera untuk mendukung para petani di daerah sekitarnya”. Walaupun tidak ada data kuantitatif yang memadai,

² Komposisi pekerjaan itu sekaligus dapat dijadikan indikator untuk menunjukkan adanya ciri perkotaan yang sangat jelas pada Kotagede dibandingkan dengan wilayah sekitarnya yang masih dikategorikan sebagai pedesaan pada awal abad ke-20.

secara pasti dapat dikatakan bahwa jumlah buruh yang dipekerjakan di Kotagede bertambah dalam jumlah yang besar sejak dekade pertama abad ke-20. Para saudagar dan pemilik perusahaan kerajinan mempekerjakan ribuan orang, baik penduduk lokal maupun pekerja yang datang dari luar Kotagede. Paling tidak terdapat 10 juragan yang masing-masing mempekerjakan 50 sampai 100 pekerja, akan tetapi sebagian besar hanya memiliki sepuluh sampai dua puluh pekerja.

Dalam kondisi seperti itu, para pekerja dan pemilik modal memiliki peran yang penting dalam transformasi perbedaan ideologi di Kotagede sejak tahun 1920-an. Masyarakat tidak lagi terbagi menjadi santri dan abangan, tetapi juga antara Islam dan komunisme. Namun pembagian itu tidak didasarkan pada perbedaan kelas sosial, antara pekerja dan pemilik modal melainkan lebih bersifat politis ideologis yang melintasi batas kelas. Selain itu, biarpun secara tradisional dikenal sebagai pusat kegiatan Muhammadiyah yang memiliki kecenderungan berlawanan dengan komunisme, kelompok komunis ternyata juga mampu menggalang dukungan yang kuat dari penduduk lokal di Kotagede. Akibatnya, sebuah konfrontasi terbuka terjadi antara kedua kelompok pada tahun 1924.

Seperti penduduk di wilayah lain di Yogyakarta, kondisi ekonomi penduduk Kotagede juga tidak luput dari pengaruh resesi ekonomi tahun 1930-an. Pada saat itu banyak pedagang dan perajin Kotagede mengalami kebangkrutan, karena sebagian besar pembeli potensial produk mereka juga mengalami krisis yang sama. Akan tetapi hal itu tidak merubah Kotagede secara besar-besaran. Walaupun kemakmuran sebagian besar penduduk kota ini mengalami penurunan, tidak terjadi perubahan sosial dan ekonomi yang struktural. Bukti yang ada menunjukkan tidak terjadi keresahan dan kekacauan sosial di kota ini pada saat itu. Bahkan sebuah penelitian awal menunjukkan bahwa ekonomi Kotagede didukung oleh berkembangnya bisnis baru yang berkaitan dengan daur ulang alat-alat yang terbuat dari perak, tembaga, kuningan, dan perunggu segera setelah masa tersulit dari krisis telah dilewati.

3. Kekerasan dan Kriminalitas

Sejarah kekerasan di Kotagede pada akhir masa kolonial paling tidak dapat dirunut ke belakang pada masa pendudukan Jepang, ketika masyarakat Kotagede harus berhadapan dengan perubahan baik yang terjadi secara internal maupun perubahan yang terjadi di luar komunitas mereka. Persoalan yang ada tidak hanya menyangkut kesulitan ekonomi, melainkan situasi yang ada telah menimbulkan ketegangan dan ketidakteraturan sosial di dalam masyarakat Kotagede.

Memang tidak bisa dipungkiri bahwa keadaan ekonomi sebagian besar penduduk Kotagede jauh lebih baik daripada sebagian besar penduduk di tempat lain di Jawa, akan tetapi nampaknya bahwa penduduk Kotagede di beberapa tempat mulai kehilangan solidaritas sosial mereka, kesabaran, dan tidak terkontrol. Akibatnya, mereka cenderung menjadi brutal dan menunjukkan sikap dan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai tradisional mereka. Di Mutihan dan Singosaren yang menjadi lokasi sebagian besar tanah pertanian sebagai contoh, beberapa orang baik dari dalam maupun luar Kotagede dianiaya secara kejam dan bahkan dibunuh di tempat karena penduduk lokal berhasil menangkap mereka pada saat sedang mencuri jagung, padi, atau ketela. Sepasang suami istri juga dibunuh ketika mereka sedang memetik daun ketela di kebun milik penduduk Kotagede. Sementara itu beberapa kasus yang hampir sama juga terjadi di pasar Kotagede. Bukti yang ada menunjukkan cukup banyak orang yang dipukul dengan kejam dan bahkan dibunuh karena dicurigai atau dituduh mencuri makanan, pakaian dan termasuk barang-barang yang sangat tidak berharga. Di samping itu, dua toko milik orang Cina di dekat pasar juga dirampok, dan mereka tidak diperkenankan meneruskan bisnisnya setelah itu.

Penduduk Kotagede juga terlibat dalam kekacauan kota karena berbagai alasan. Seperti telah disebutkan sebelumnya, secara umum kehidupan ekonomi penduduk Kotagede masih cukup baik. Hal itu ternyata menjadi daya tarik bagi orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan atau orang-orang lapar dari luar untuk datang ke Kotagede. Terdapat banyak kasus dilaporkan tentang tindakan penduduk

memindahkan mayat atau orang sekarat yang tidak teridentifikasi dari dalam wilayah mereka ke dalam batas wilayah yang lain. Sebagai respon terhadap hal itu, penduduk wilayah yang lain juga melakukan hal yang sama. Akibatnya, terdapat bukti yang menunjukkan tindakan penduduk Kotagede menarik tubuh orang sekarat dari satu tempat ke tempat lain berkali-kali di jalan, dan kemudian ditinggalkan begitu saja sampai akhirnya korban meninggal dunia. Bukti lain menunjukkan orang sekarat atau mayat dibiarkan sehari-hari tanpa perhatian, atau bahkan penduduk dari kampung-kampung yang berbeda saling berkelahi terlebih dahulu untuk menghindari beban merawat orang sekarat atau mayat itu.

Keadaan yang tidak kalah menyedihkan juga terjadi di pasar Kotagede, tempat banyak orang dari luar wilayah itu menggunakannya sebagai tempat tinggal mereka sementara. Bagi orang sakit yang tidak memiliki teman atau keluarga, mereka biasanya diusir dari tempat itu. Sedangkan mereka yang sekarat biasanya dibawa keluar dari pasar karena para pendatang sementara, pedagang, dan penduduk di sekitarnya tidak ingin terbebani jika orang itu meninggal dunia. Selain itu, beberapa orang kaya di Kotagede, terutama di kalangan para pelepas uang memanfaatkan kesulitan yang sedang melanda masyarakat luas pada waktu itu untuk keuntungan ekonomis mereka pribadi. Para pelepas uang itu hanya memberikan uang, makanan atau pakaian yang sedikit kepada orang-orang yang datang kepada mereka, tidak sebanding dengan nilai rumah, tanah, dan perhiasan yang diserahkan. Selain penduduk Kotagede yang sedang mengalami kesulitan ekonomis, banyak penduduk dari luar Kotagede yang juga menjual atau sekedar menggadaikan harta benda berharga mereka kepada para pelepas uang itu.³

Walaupun Kotagede relatif aman seperti juga sebagian besar wilayah di Yogyakarta pada awal kemerdekaan, terdapat beberapa bukti yang menunjukkan bahwa pencurian dan perampokan di Kotagede terus meningkat, terutama sejak

³ Bukti-bukti itu jangan diinterpretasi secara berlebihan untuk menyatakan bahwa semua orang di Kotagede tidak memiliki kepedulian sosial terhadap kesulitan yang dihadapi masyarakat pada waktu itu, karena beberapa bukti juga menunjukkan bahwa Muhammadiyah secara rutin melakukan berbagai aksi sosial untuk membantu masyarakat yang sedang mengalami kesulitan. Satu hal yang ingin dikatakan dalam tulisan ini bahwa pendudukan Jepang telah menimbulkan ketidakseimbangan sosial dan intoleransi di dalam masyarakat Kotagede, sesuatu yang ternyata tidak hilang begitu saja ketika Indonesia telah merdeka.

Yogyakarta menjadi ibukota Republik Indonesia dan pusat perjuangan. Beberapa keluarga kaya di Kotagede melaporkan bahwa mereka telah dirampok atau mendapat ancaman secara reguler dari para kriminal, baik dari penduduk setempat maupun pendatang. Kasus yang sama dilaporkan oleh para pedagang, penduduk biasa, dan kusir andong yang melewati jalan utama yang menghubungkan Kotagede dengan pusat kota Yogyakarta. Mereka melaporkan tentang sekelompok *grayak* yang secara rutin beroperasi di sepanjang jalan itu ketika hari mulai gelap. Akibatnya, sebagian besar pedagang menghindari perjalanan setelah magrib atau sebelum matahari terbit. Sementara itu banyak kusir yang melayani jalur itu cenderung menolak membawa penumpang dari dan ke Kotagede melalui jalan itu pada malam hari walaupun mereka dijanjikan bayaran yang mahal. Jika mereka sudah terlanjur berada di Kotagede ketika matahari sudah terbenam, para kusir andong itu memilih tinggal di Kotagede sampai pagi berikutnya.

Secara perlahan para *grayak* itu bahkan mulai masuk ke dalam kota, baik pada siang maupun malam hari. Bahkan terdapat bukti yang menunjukkan para *grayak* itu tanpa rasa takut mendatangi rumah penduduk dari pintu ke pintu, kemudian memaksa penduduk memberi uang atau menyerahkan barang-barang berharga. Hal itu tentu saja kemudian mengundang reaksi dari penduduk Kotagede untuk melakukan pengamanan terhadap wilayah mereka.

Para laskar yang berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda dan selalu bertentangan secara politis memainkan peranan unik berkaitan dengan masalah keamanan itu. Pada satu sisi mereka ternyata dapat bekerjasama melindungi penduduk Kotagede dari ancaman para kriminal dan kekacauan sosial lainnya pada awal kemerdekaan. Namun di sisi yang lain terdapat juga bukti yang menunjukkan keterlibatan mereka di dalam ketidakteraturan di Kotagede pada masa itu. Laskar terbukti berhasil menangkap beberapa orang perampok, akan tetapi mereka menerapkan tindakan yang berbeda terhadap para perampok itu. Berdasarkan salah satu bukti yang berhasil dikumpulkan, dari sepuluh kasus penangkapan terhadap perampok, hanya dua orang yang dibawa ke polisi dan kemudian diadili. Sementara perampok yang lain hilang tanpa bekas. Sebuah informasi menyatakan bahwa para perampok itu dibunuh oleh laskar, sedangkan

informasi yang lain menyebutkan bahwa sebagian dari para perampok itu dilepas begitu saja karena merupakan bagian dari kelompok mereka.

Diantara penduduk Kotagede yang menjadi korban aksi kriminal itu, para keluarga Kalang yang kaya merupakan kelompok yang paling menderita. Sebagai kelompok yang berhasil secara ekonomis, para keluarga Kalang tidak hanya menguasai bisnis pegadaian, usaha kerajinan, tekstil, dan transportasi melainkan juga aktivitas ekonomi Kotagede secara keseluruhan. Para keluarga Kalang itu dikenal sebagai orang bumiputera pertama di Jawa yang memiliki mobil Roll Royces, berkeinginan untuk mendekorasi lantai ruang resepsi terbukanya dengan ribuan koin *rix-dollar* sebelum dilarang oleh pemerintah kolonial, keluarga yang mampu meminjamkan banyak uang kepada para bangsawan keraton, memiliki lebih dari 10 balok emas sebesar kaleng minyak tanah, dan mendekorasi ruang tamunya dengan setandan pisang yang terbuat dari mas murni. Namun seperti juga orang Cina di Indonesia, para keluarga Kalang itu tidak pernah dianggap sebagai pribumi di Kotagede. Mereka harus menerima kenyataan selalu dianggap sebagai orang asing di kota yang telah menjadi tempat tinggal mereka dari generasi ke generasi.

Perampokan terhadap keluarga Kalang yang kaya terjadi di rumah Projodrono dan Prawiro Soewarno, yang dikenal dengan nama panggilan Tembong. Orang yang terakhir dikenal sebagai raja rumah gadai, yang memiliki rumah gadai baik di dalam maupun di luar Kotagede. Ia memiliki beberapa rumah di Kotagede, dan salah satunya adalah bangunan layaknya sebuah istana. Perampokan pertama terjadi pada hari Rabu, beberapa hari sebelum aksi militer Belanda kedua pada tanggal 19 Desember 1948. Beberapa orang yang melumurkan muka mereka dengan lumpur dan berpakaian sipil serta militer, pada siang hari tanpa ragu-ragu memasuki rumah kedua korban dan membawa pergi barang berharga yang banyak. Kedua korban kemudian melaporkan kasus perampokan itu kepada komandan militer yang bertanggung jawab terhadap keamanan di Kotagede, sekaligus mengidentifikasi para perampoknya. Laporan itu tidak mendapat perhatian, sehingga tidak ada tindakan dari penguasa militer setempat untuk melakukan penyelidikan. Hal itu dapat dijelaskan karena

pemimpin tentara di Kotagede itu tidak ingin berhadapan langsung dengan sesama rekan pejuang yang diidentifikasi oleh pemilik rumah sebagai pelaku perampokan.

Keputusan untuk tidak menyeliki kasus perampokan itu mendorong terjadinya perampokan kedua, beberapa hari setelah kota Yogyakarta diduduki oleh Belanda. Pada kasus yang kedua, para perampok dalam jumlah yang besar hanya merampok rumah Tembong. Selain membawa pergi uang dan perhiasan dalam jumlah yang sangat banyak, para perampok juga membawa pergi tidak kurang dari 15 batang emas murni sebesar kaleng minyak tanah, dekorasi berbentuk sepasang gula jawa terbuat dari emas murni, setandan pisang terbuat dari emas murni, dan berusaha membunuh pemilik rumah namun gagal. Para perampok dengan mudah menghilang melalui sungai, dan meninggalkan *safety box* sepanjang tepi sungai.

Berbeda dengan perampokan pertama, pemimpin tentara dan laskar di Kotagede melakukan penyelidikan terhadap kasus perampokan setelah para perampok secara terbuka menyatakan akan menggunakan hasil rampokan untuk membiayai perjuangan melawan aksi militer Belanda. Selain itu penduduk setempat juga berusaha mencari peruntungan, karena pemilik rumah menjanjikan akan memberi imbalan kepada setiap orang yang berhasil mengembalikan harta benda mereka. Dalam kenyataannya tidak ada seorang perampok pun yang berhasil ditangkap, namun sebagian harga benda milik keluarga Kalang itu ditemukan tersimpan di atas pohon kelapa di luar Kotagede, termasuk di wilayah Gunung Kidul sekitar 25 kilometer sebelah selatan Kotagede.

Segera setelah perang berakhir, beberapa penduduk Kotagede secara tiba-tiba menjadi kaya dan berperilaku aneh. Salah seorang yang dicurigai sebagai perampok memiliki kebiasaan memakan enam telur goreng setiap kali makan, sedangkan penduduk yang lain mulai membuka usaha kerajinan yang memerlukan modal besar. Padahal sebelumnya, mereka dikategorikan sebagai kelompok buruh dan petani dengan tingkat kemampuan ekonomi yang rendah. Tidak mengherankan jika ada yang berpendapat bahwa sebagian interprenur yang berhasil di Kotagede kemudian

memulai bisnis mereka dari harta benda yang di curi dari keluarga Kalang yang kaya pada awal kemerdekaan.

Biarpun sebagian keluarga Kalang yang kaya di Kotagede luput dari perampokan sampai perang berakhir, perampokan yang dialami keluarga Kalang yang lain meninggalkan pengalaman traumatik pada kelompok ini. Mereka menemukan rumah mereka yang bagus di Kotagede telah menjadi tempat tinggal tentara Belanda selama perang, dan kemudian diambil alih oleh tentara Indonesia. Ketika rumah-rumah itu dikembalikan, para keluarga Kalang menjual hampir seluruh rumah mereka di Kotagede. Secara perlahan-lahan mereka mulai meninggalkan Kotagede, menyebar ke berbagai kota lain baik di dalam maupun di luar wilayah Yogyakarta, dan tidak pernah kembali. Keluarga Tembong pindah ke selatan ke wilayah santri lain di Wonokromo Bantul, tempat keluarga ini mendirikan sebuah perusahaan bus pada tahun 1950-an.

Akhirnya, sejarah masyarakat kota di Kotagede pada masa transisi telah menunjukkan adanya keragaman realitas sejarah. Pada saat masyarakat harus berhadapan dengan krisis, perilaku dan tindakan mereka baik sebagai individu maupun kelompok tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai yang ingin mereka jadikan sebagai identitas atau imej umum yang dilihat dari luar. Kekerasan dan kriminalitas ternyata menjadi bagian dari realitas sejarah masyarakat kota di Kotagede, walaupun memori kolektif dan sejarah yang mereka ingat secara umum mengingkari adanya kekerasan dan kriminalitas yang pernah terjadi.

Daftar Pustaka

- Abdurrachman Surjomihardjo,, *Sejarah Perkembangan Sosial Kota Yogyakarta*. Yogyakarta: Yayasan untuk Indonesia, 2000.
- Bambang Purwanto, “Reality and Myth in Contemporary Indonesian History”, *Humaniora*, XIII, 2, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Budaya UGM, 2001
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Revolusi Nasional di Tingkat Lokal*, Jakarta: 1989
- Dhamar Lestari, “Kota Yogyakarta: Ibukota Republik Indonesia dalam Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan(1946-1949)”, Skripsi S1 yang tidak diterbitkan, Yogyakarta: Jurusan Sejarah Fakultas Sastra UGM, 1997
- Frederick, William, “Shadow of an Unseen Hand. Some Patterns of Violence in the Indonesian Revolution, 1945-1949”, in Freek Colombijn & J. Thomas Lindblad ed., *Root of Violence in Indonesia. Contemporary Violence in Historical Perspective*, Leiden: KITLV, 2002
- Jang A. Muttalib & Sudjarwo, “Gelandangan dalam Kancah Revolusi”, in LRPM UII, *Gelandangan. Pandangan Ilmuan Sosial*, Jakarta: LP3ES, 1984
- Langgeng Sulistyio Budi, “Permasalahan Perkotaan pada Periode Revolusi: Kriminalitas di Yogyakarta, 1946-1948”, *Lembaran Sejarah*, 1, 2, Yogyakarta: Jurusan Sejarah Fakultas Sastra UGM, 1997/1998
- Ludtke, Alf (ed), *The History of Everyday Life. Reconstructing Historical Experiences and Ways of Life*, New Jersey: 1995
- Mutiah Amini, “Buruh Perak dan Perkembangan Politik Kotagede Tahun 1960-1965”, Skripsi S1 tidak diterbitkan, Yogyakarta: Jurusan Sejarah Fakultas Sastra UGM, 1994
- O'Malley, William Joseph, “Indonesia in the Great Depression A Study of East Sumatra and Yogyakarta in the 1930's”, unpublished Ph.D thesis, Cornell University, 1977
- Nakamura, Mitsuo *The Crescent Arises over the Banyan Tree*, Yogyakarta: 1993

The 1st International Conference on Urban History, Surabaya 23-25 August 2004

Ryadi Gunawan, “Jagoan dalam Revolusi Kita”, *Prisma*, No.8, Jakarta: LP3ES Agustus, 1981

Sartono Kartodirdjo *et al.*, ed., *Sejarah Nasional Indonesia VI* Jakarta: Depdikbud, 1976

Sartono Kartodirdjo, “Wajah Revolusi Indonesia Dipandang dari Perspektivisme Struktural”, *Prisma*, X, 8, Jakarta: LP3ES, Agustus 1981

Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1981

van Mook, H.J., “Kuta Gede Before the Reorganization’ in W.F. Wertheim, *et al.*, ed, *The Indonesian Town. Studies in Urban Sociology*, The Hague: 1958

Sulardjo Pontjosutirto, “Beberapa Hal Tentang Orang Kalang”, Tesis Sarjana tidak diterbitkan, Yogyakarta: Jurusan Sejarah Fakultas Sastra dan Kebudayaan UGM, 1966